

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di negara Indonesia, tidak hanya industri yang memproduksi barang dan jasa saja yang menjadi sorotan publik, melainkan industri di pelayanan atau sektor publik juga sangat di perhatikan. Bahkan masyarakat Indonesia cukup sensitif bila suatu perusahaan sektor publik tidak memberi pelayanan yang memuaskan atau tidak berkualitas kepada masyarakat. Masyarakat akan menuntut pertanggungjawaban dari apa yang seharusnya mereka terima dari perusahaan sektor publik tersebut. Maka dari itu suatu pertanggungjawaban yang berkualitas akan sangat berguna untuk masyarakat Indonesia sebagai salah satu acuan mereka dalam mengambil keputusan.

Pemerintah menetapkan aturan tentang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan Keuangan Negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 untuk mengatur pelaporan tanggungjawab yang dibuatnya. Laporan keuangan pemerintah adalah wujud tanggungjawab pemerintah guna menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah juga mempublikasikan PP No. 71 Tahun 2010 agar pemerintahan memiliki standar dalam penyelenggaraan akuntansi agar dapat diikuti berbagai prinsip penyusunannya dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan tersebut setelah diaudit BPK selanjutnya diinformasikan kepada DPR/DPRD dan diterbitkan kepada publik. Komponen penyampaian laporan tersebut antara lain Laporan Catatan atas Laporan Keuangan, Arus kas, dan Realisasi Anggaran.

Laporan keuangan merupakan informasi finansial berupa catatan transaksi entitas yang berguna sebagai pemberi gambaran kinerja entitas terkait pada periode akuntansi. IAI (Ikatan

Akuntan Indonesia) menerbitkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang bertujuan untuk menyiapkan informasi terkait dengan posisi maupun perubahan posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang akan digunakan oleh para pemakai untuk mengambil keputusan. Walaupun begitu, informasi yang ada pada laporan keuangan tidak mampu terpenuhi seluruhnya untuk dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai sebab laporan keuangan tersebut hanya memberikan gambaran peristiwa lampau yang berpengaruh dan entitas tidak wajib menyediakan informasi secara detail (Nurillah, 2014).

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) PP No 24 Tahun 2005 sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 dengan digantikan PP No 71 Tahun 2010 menggantikan dengan ruang lingkup utamanya adalah SAP Basis AkruaI dan SAP peralihan (Basis Kas Menuju AkruaI). Lampiran I sebagai rincian SAP Basis AkruaI diberlakukan segera setelah tanggal penetapan setiap entitas. Lampiran II sebagai rincian SAP peralihan diberlakukan pada entitas yang belum siap dalam mengaplikasikan SAP Basis AkruaI saat masa peralihan. SAP adalah sejumlah prinsip akuntansi untuk diaplikasikan pada laporan keuangan yang disusun dan disajikan pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, di Indonesia SAP dipandang sebagai syarat dalam usaha mengoptimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang berkekuatan hukum.

Study #14 IFAC Public Sector Committee dalam (Sari, 2012) secara lebih mendalam menjelaskan jika laporan basis akruaI digunakan pada evaluasi kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan dan efisiensi biaya jasa pelayanan. Pemakai laporan keuangan bisa melakukan identifikasi terhadap kesesuaian kapasitas riil dari kemampuan pendanaan pemerintah serta posisi dan perubahan keuangan pemerintah. Selain itu, basis akruaI ini dapat digunakan untuk melakukan identifikasi atas ada tidaknya peluang penggunaan sumberdaya di masa mendatang dan untuk mencapai tujuan manajemen yang baik.

Pada UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan jika pelaporan tanggung jawab keuangan pemerintah wajib dilakukan audit oleh BPK terlebih dahulu dan setelahnya diberikan pada legislatif sesuai Kewenangan yang dimilikinya. Audit oleh BPK merupakan tanggung jawab pada keuangan negara yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2004. Sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan agar menghasilkan kualitas yang baik adalah mudah dipahami, dapat dibandingkan, handal, dan relevan. Kriteria-kriteria tersebut adalah aspek terpenting dalam menciptakan kualitas yang baik pada laporan keuangan yang membuktikan realisasi dan pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah (Juwita, 2013).

Hasil audit BPK atas LKPD menghasilkan sebuah opini berbentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap entitas terkait. Semakin kuatnya Sistem Pengendalian Intern dapat mengoptimalkan kualitas laporan keuangan SKPD. SPI merupakan perencanaan semua alat dan metode serta struktur organisasi yang dikoordinasikan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan properti entitas, membantu mendorong kepatuhan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, mendorong efisiensi, memeriksa keakuratan dan kebenaran data akuntansi. Sedangkan peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar keuangan yang dikelola dapat berjalan sesuai dengan peraturan.

Menurut FASB (*Financial Accounting Standard Board*) menyebutkan jika auditor internal berkontribusi aktif dalam mewujudkan efektivitas pada *Corporate Governance* sekaligus pula ikut terlibat dalam proses pelaporan keuangan (Amalia, 2014). Audit Internal adalah aktivitas yang dilakukan oleh entitas itu sendiri untuk memberikan objektivitas keyakinan dan perencanaan konsultasi sebagai peningkatan operasional dan pemberi nilai tambah entitas. Audit tersebut digunakan untuk memberikan bantuan bagi entitas melalui pendekatan sistematis dan kedisiplinan dan dalam peningkatan efektivitas dan

evaluasi dari kecukupan pengendalian, manajemen organisasi, dan proses pengelolaan risiko (*Board of Directors* IIA dalam Arif, 2016).

Apabila auditor internal dapat bekerjasama dalam bertugas, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat kualitasnya. Peningkatan tersebut dapat mengurangi *fraud* (kecurangan). Artinya, auditor internal sangat berperan besar atas laporan keuangan yang berkualitas bagi lembaga/perusahaan. (Arif, 2016).

Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh (Nugraha dan Susanti, 2010) dalam (Sukmaningrum, 2012) mengemukakan jika keandalan laporan keuangan dipengaruhi oleh SPI secara positif. Hasil penelitian (Nugraha dan Susanti, 2010) sejalan dengan penelitian (Sukmaningrum, 2012) yang menunjukkan jika kualitas informasi LKPD dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Nurani dan Sumiyati, 2014) yang dipublikasikan melalui Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis. Penelitian sebelumnya juga menyarankan perlu dilakukan penelitian mendalam atas berbagai pengaruh faktor lain terhadap kualitas laporan keuangan (contohnya: sistem akuntansi keuangan daerah). Keberadaan sistem akuntansi tersebut mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab penyelenggaraan APBD. Selain itu, pengawasan internal dapat menjadi upaya dalam memberikan jaminan yang sesuai tugas pemerintah agar berhasil dan bermanfaat dalam pelaksanaannya. Serta aparatur pemerintah daerah yang menjadi penentu kualitas SDM. Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian pada jurnal utama (Nurani dan Sumiyati, 2014) yaitu menambahkan Peran Audit Internal sebagai variabel independen untuk memperkuat pada penelitian ini. Perbedaan kedua yaitu hanya mempergunakan objek penelitian berupa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Semarang. Perbedaan ketiga yaitu Penggunaan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang paling baru yaitu penggunaan basis Akrua yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 untuk menyajikan LKPD.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris dari pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Semarang.
2. Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Aspek manfaat penelitian ini yaitu

1. Aspek Teoritis

Diharapkan bermanfaat bagi Ilmu Ekonomi terutama Akuntansi, yaitu Akuntansi Sektor Publik tentang Penerapan SAP dan peran audit internal dalam Kualitas Laporan Keuangan.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dapat memberi kontribusi pada dunia pendidikan yang berhubungan penyajian LKPD yang lebih berkualitas dan memberi masukan untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas.